

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN POHUWATO MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 10, 2024



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN POHUWATO MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 10, 2024

<https://pohuwatokab.bps.go.id>

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran 2019-2023

Volume 10, 2024

Katalog : 9302020.7503

ISSN : 2987-3096

Nomor Publikasi : 75030.24004

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii+73 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.

TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN POHUWATO MENURUT PENGELUARAN 2019 - 2023

Volume 10, 2024

Pengarah	: Puguh Raharjo, SST., MT.
Penanggung Jawab	: Intan Nur Alfiani, S.Tr.Stat.
Penyunting	: Dyah Ayu Nurhayati, S.Tr.Stat.
Penulis Naskah	: Intan Nur Alfiani, S.Tr.Stat.
Pengolah data	: Intan Nur Alfiani, S.Tr.Stat.
Penata Letak	: Dyah Ayu Nurhayati, S.Tr.Stat. Intan Nur Alfiani, S.Tr.Stat.
Desain Kover dan Infografis	: Dyah Ayu Nurhayati, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*Industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto (ekspor dikurangi dengan impor). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Marisa, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pohuwato



Puguh Raharjo, SST. MT.

DAFTAR ISI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN POHUWATO MENURUT PENGELUARAN 2019 - 2023

Volume 10, 2024

		Halaman
Kata Pengantar.....		v
Daftar Isi.....		vii
Daftar Tabel.....		ix
Daftar Gambar.....		xi
Infografis.....		1
Bab I	Pendahuluan.....	3
	1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	5
	1.2 Kegunaan Statistik PDRB.....	6
	1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	7
Bab II	Metode Estimasi dan Sumber Data.....	11
	2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	13
	2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	16
	2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	19
	2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	21
	2.5 Perubahan Inventori.....	26
	2.6 Ekspor Impor.....	30
Bab III	Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pohuwato Berdasarkan PDRB Pengeluaran Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023.....	31
	3.1 Tinjauan Agregat PDRB Gorontalo Menurut Pengeluaran.....	33
	3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	37
	3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	40
	3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	41
	3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	43
	3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	44
	3.7 Perkembangan Net Ekspor	45
Bab IV	Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023...	47
	4.1 PDRB (Nominal).....	49
	4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	50
	4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.....	51

4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	52
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	53
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor.....	54
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	55
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	56
Bab V	Penutup.....	59
	Daftar Pustaka.....	63
	Lampiran.....	65

<https://pohuwatokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008.....	10
Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023.....	33
Tabel 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023.....	34
Tabel 4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023.....	35
Tabel 5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023.....	36
Tabel 6 Indeks Implisit PDRB Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023.....	37
Tabel 7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	37
Tabel 8 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	39
Tabel 9 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	39
Tabel 10 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	40
Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	41
Tabel 12 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	41
Tabel 13 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	43
Tabel 14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023..	45
Tabel 15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	49

Tabel 16	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	51
Tabel 17	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	51
Tabel 18	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 19	Rasio Ekspor terhadap PMTB Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	54
Tabel 20	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	54
Tabel 21	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	55
Tabel 22	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023.....	57

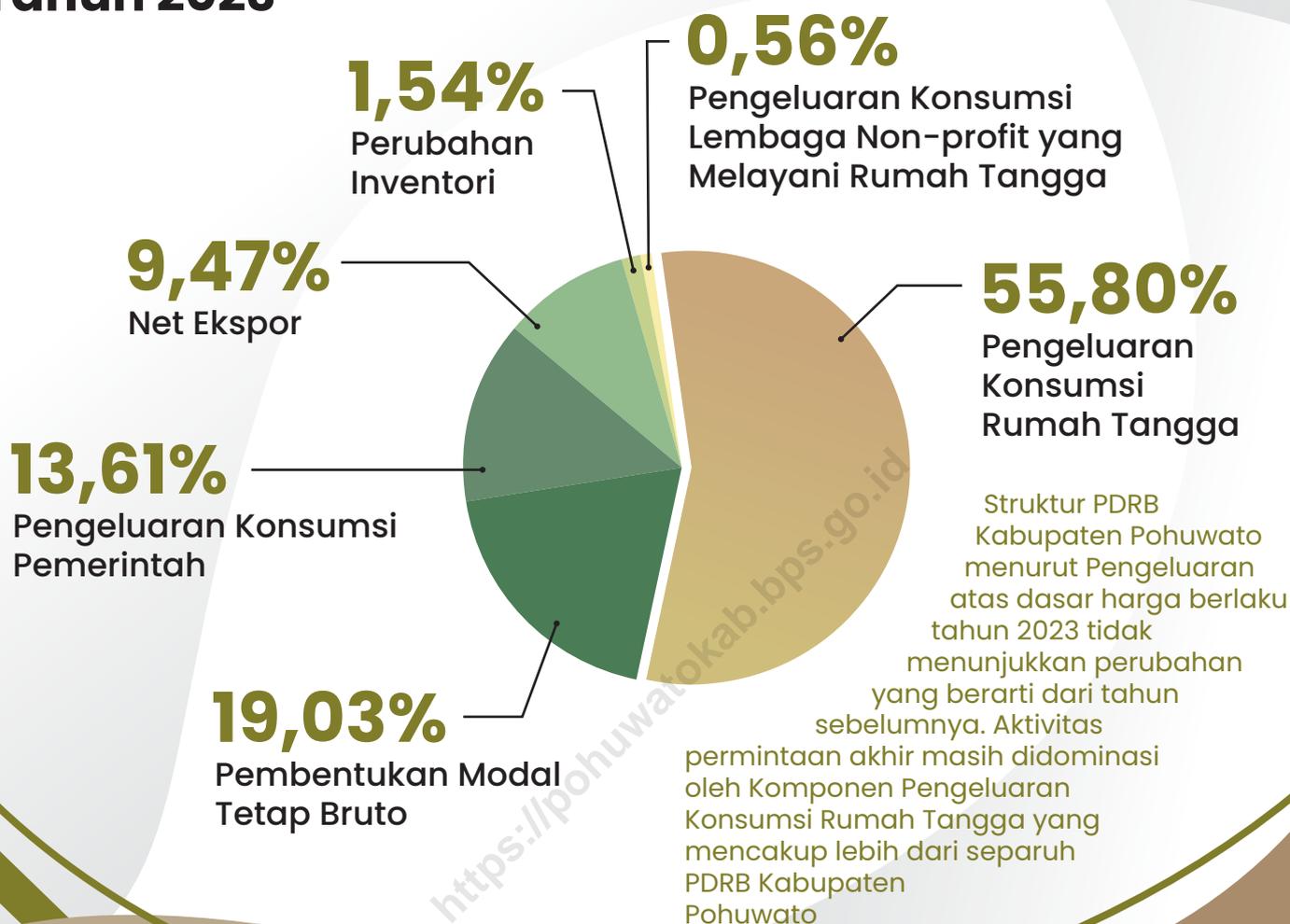
<https://pohuwatokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

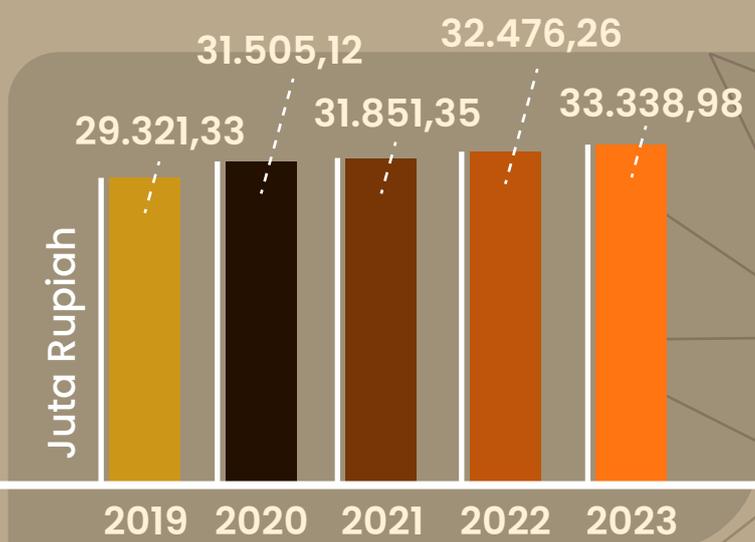
	Halaman
Gambar 1	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023..... 35
Gambar 2	Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, dan Penduduk Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023..... 50
Gambar 3	Perkembangan Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023 52
Gambar 4	Perkembangan Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato, Tahun 2019-2023..... 53

<https://pohuwatokab.bps.go.id>

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pohuwato Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2023



PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010



1

PENDAHULUAN

<https://pohuwatokab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi antar periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha, yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 17. Jasa Lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri/luar daerah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;

- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index / PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 di antaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 di antaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR) merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).
- Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*) merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional *Standard Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://pohuwatokab.bps.go.id>

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations) sebagai berikut:

- Makanan dan minuman tidak beralkohol;
- Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotik;
- Pakaian dan alas kaki;
- Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya;
- Furniture, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin;
- Kesehatan;
- Angkutan;
- Komunikasi;
- Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
- Pendidikan;

- Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel; dan
- Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

- Makanan, minuman, dan rokok;
- Pakaian dan alas kaki;
- Perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga;
- Kesehatan dan pendidikan;
- Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya;
- Hotel dan restoran; dan
- Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain; dan
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti: barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PK-RT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu, dan
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PK-RT atas dasar harga berlaku. PK-RT atas dasar harga konstan 2010, diperoleh dengan cara men"deflate" PK-RT atas dasar harga berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PK-RT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu.
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP.
4. Diperoleh nilai PK-RT tahun berjalan yang telah di-*adjust*.
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP.
6. PK-RT atas dasar harga konstan diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non-pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, dan faksimili; biaya rapat, seminar, dan perjamuan; transportasi, bahan bakar, dan perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lain; sewa gedung dan sewa perlengkapan kantor; dan lain-lain;
- Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya;
- Penyusutan; dan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-LNPRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP)
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} = rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} = PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i = jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i = jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j = jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X = PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i = populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Dari hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku. PK-LNPRT atas dasar harga konstan 2010, diperoleh dengan cara men" *deflate*" PK-LNPRT atas dasar harga berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atau unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/ daerah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti: sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sementara itu, sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) provinsi mencakup: a. PK-pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-pemerintah provinsi yang bersangkutan; c. PK-pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi; dan d. PK-pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P provinsi tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (BKD dan Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kemenkeu serta Indeks Harga dari BPS

2. Metode penghitungan

- PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga berlaku} = \text{output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar yang dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan. Untuk level provinsi, PK-P provinsi atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

- PK-P Provinsi atas dasar harga konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar, aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup: pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya.
- Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan, dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat
- Indeks produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi)
- Laporan keuangan perusahaan
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas)
- Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum
- Publikasi Statistik Konstruksi
- Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Statistik Peternakan dari Ditjen Peternakan

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sementara itu, pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti: biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau adh pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan IHPB yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan dengan men“deflate” PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu, penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama, seperti: mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men“*deflate*” PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sementara itu, PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan men“*deflate*” nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Sementara itu, PMTB perangkat lunak atas dasar harga konstan diperoleh dengan men“*deflate*” nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni orisinal (*entertainment, literary, and artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sementara itu, data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men"deflate" nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Sementara itu, bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok, seperti: beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilakunya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang, yakni sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti: produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, dan konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material* dan *supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis, seperti: beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen Perubahan Inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan keuangan perusahaan BUMN/ BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian;
- Data inventori Publikasi Tahunan Industri Besar dan Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- IHPB terpilih; dan
- Data eksternal lain, seperti: data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjenak Kementan.

2. Metode penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen Perubahan Inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori pada waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang

berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan dengan cara men"deflate" stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan meng"inflate" perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir tahun dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. men"deflate" nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* guna melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah, ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- Impor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- Net ekspor adalah selisih antara Ekspor antar daerah dan Impor antar daerah

iv. Sumber data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun seringkali untuk mengestimasi masih mengalami adanya keterbatasan data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

3

**TINJAUAN
PEREKONOMIAN
KABUPATEN
POHUWATO**

<https://pohuwato.kab.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pohuwato akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 s.d. 2023, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara itu, faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar kabupaten/kota maupun internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Pohuwato digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB POHUWATO MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Pohuwato menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun (2019 s.d. 2023). Hal ini ditunjukkan oleh PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif pada tahun 2019-2023. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB. Tahun 2023, secara agregat perekonomian Pohuwato sudah kembali normal pasca pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2021*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.766,62	3.839,11	3.997,41	4.239,55	4.525,53
2. Konsumsi LNPRT	38,64	39,03	40,03	42,58	45,10
3. Konsumsi Pemerintah	1.042,74	985,072	1.037,41	1.068,35	1.103,88
4. PMTB	1.298,73	1.309,73	1.359,49	1.449,27	1.543,66
5. Perubahan Inventori	161,58	126,77	110,88	117,19	124,53
6. Net Ekspor	313,57	436,93	510,33	617,08	768,00
Total PDRB	6.621,89	6.736,63	7.055,55	7.534,01	8.110,69

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

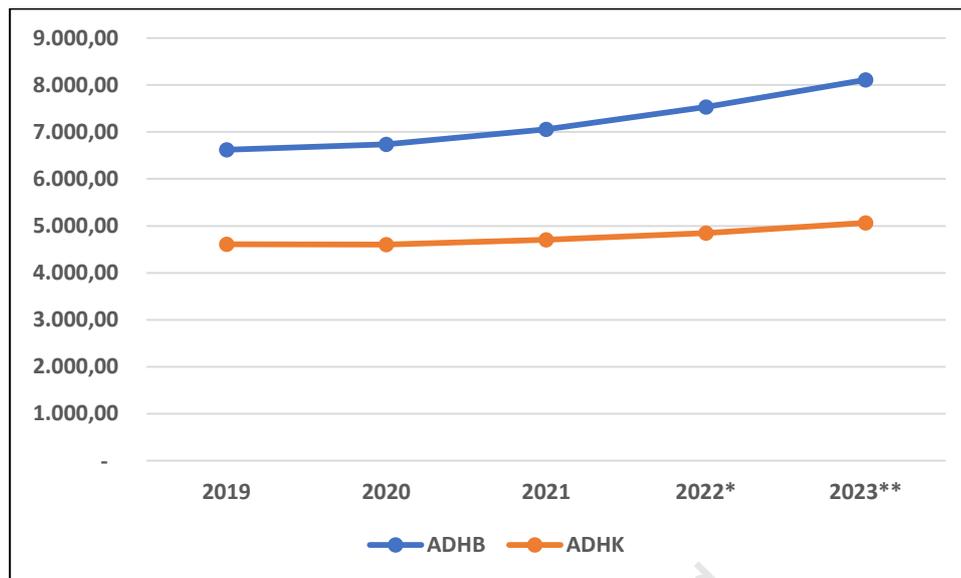
Nilai PDRB Kabupaten Pohuwato atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2019 s.d. 2023 menunjukkan peningkatan secara signifikan. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 6.621,89 miliar rupiah dan meningkat menjadi 8.110,69 miliar rupiah pada tahun 2023.

Tabel 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.707,19	2.712,81	2.761,44	2.831,26	2.921,64
2. Konsumsi LNPR	27,53	27,43	27,54	28,33	29,26
3. Konsumsi Pemerintah	683,80	636,57	657,29	661,24	664,69
4. PMTB	959,87	954,14	966,49	986,37	1.015,09
5. Perubahan Inventori	86,41	66,96	57,29	58,46	59,53
6. Net Ekspor	145,68	204,34	234,08	283,35	372,31
Total PDRB	4.610,49	4.602,27	4.704,13	4.849,00	5.062,52

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Pohuwato berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2019-2023, tetapi mengalami perlambatan di tahun 2020 karena pandemic Covid-19. Pada tahun 2023, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan peningkatan.



Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Gambar 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Dari gambar di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	56,88	56,99	56,66	56,27	55,80
2. Konsumsi LNPRT	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56
3. Konsumsi Pemerintah	15,75	14,62	14,70	14,18	13,61
4. PMTB	19,61	19,44	19,27	19,24	19,03
5. Perubahan Inventori	2,44	1,88	1,57	1,56	1,54
6. Net Ekspor	4,74	6,49	7,23	8,19	9,47
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa selama periode 2019-2023, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Selanjutnya, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 19,03 persen pada tahun 2023. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 13,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Sementara untuk konsumsi LNPRT hanya berada pada kisaran 0,56 persen dalam pembentukan PDRB Pengeluaran Pohnuato. Net ekspor cukup mempunyai peran dalam perdagangan antar kabupaten/kota maupun internasional yang dapat direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor yang terjadi di Kabupaten Pohnuato. Proporsi net ekspor berada pada rentang 4,74 persen hingga 9,47 persen.

Tabel 5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohnuato Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,70	0,21	1,79	2,53	3,19
2. Konsumsi LNPRT	10,48	-0,37	0,41	2,86	3,29
3. Konsumsi Pemerintah	4,81	-6,91	3,25	0,60	0,52
4. PMTB	3,60	-0,60	1,29	2,06	2,91
5. Perubahan Inventori	2,22	-22,51	-14,44	2,04	1,84
6. Net Ekspor	29,45	40,26	14,52	21,05	31,39
Total PDRB	6,28	-0,18	2,21	3,08	4,40

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Pohnuato dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,28 persen (2019); -0,18 persen (2020); 2,20 persen (2021); 3,08 persen (2022) dan 4,40 persen (2023). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 6,28 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-0,18 persen).

Tabel 6 Indeks Implisit PDRB Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	139,13	141,52	144,76	149,74	154,90
2. Konsumsi LNPRT	140,35	142,28	145,35	150,32	154,14
3. Konsumsi Pemerintah	152,49	154,75	157,83	161,57	166,07
4. PMTB	135,30	137,27	140,66	146,93	152,07
5. Perubahan Inventori	186,99	189,31	193,53	200,47	209,19
6. Net Ekspor	215,24	213,82	218,31	218,47	206,28
Total PDRB	143,63	146,38	150,00	155,41	160,21

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) secara agregat menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Kumulatif kenaikan harga PDRB yang terjadi sepanjang tahun 2019-2023 adalah sebesar 16,58 persen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	3.766,62	3.839,11	3.997,40	4.239,55	4.525,53
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	2.707,19	2.712,81	2.761,35	2.831,26	2.921,64
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	56,88	56,99	56,66	56,26	55,80
Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	23.954,78	26.281,03	27.066,15	28.396,77	29.802,60
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	17.217,05	18.570,94	18.696,93	18.963,93	19.240,31
Pertumbuhan¹ (%)					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	6,70	0,21	1,79	2,53	3,19
c. Per Kapita	6,91	7,86	0,68	1,42	0,05
Jumlah Penduduk (000 Orang)	157,24	146,01	147,69	149,30	151,85

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

¹Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2019-2023, menunjukkan tren cukup fluktuatif cenderung menurun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 56,99 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu 55,80 persen.

Rata-rata konsumsi per kapita selama periode 2019-2023 terus meningkat, baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2019, secara umum setiap penduduk di Kabupaten Pohuwato menghabiskan dana sekitar 23,95 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 26,28 juta rupiah (2020); 27,07 juta rupiah (2021); 28,40 juta rupiah (2022) dan 29,80 juta rupiah (2023).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 6,70 persen pada tahun 2019. Kemudian, pada lima tahun berikutnya, pertumbuhannya berfluktuasi, dimana pada tahun 2023, komponen ini tercatat tumbuh sebesar 3,19 persen. Konsumsi per kapita juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi per kapita tercatat sebesar 6,91 persen dan tumbuh melambat menjadi 0,05 persen pada tahun 2023.

Tabel 8 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato (Persen), 2019–2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	48,42	49,34	49,79	49,49	48,80
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,86	4,86	4,80	4,79	4,61
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,04	9,22	9,17	9,39	9,26
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,09	8,24	8,40	8,35	8,52
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	20,70	19,56	19,13	19,32	19,89
f. Hotel dan Restoran	3,55	3,48	3,54	3,67	3,88
g. Lainnya	5,34	5,29	5,17	4,98	5,04
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Secara rata-rata dari tahun 2019 s.d. 2023, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Pohuwato, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 48,42 persen (2019), 49,34 persen (2020), 49,79 persen (2021), 49,49 persen (2022) dan 48,80 persen (2023).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik-menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non-makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi: biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

Tabel 9 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato (Persen), 2019–2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,38	1,79	1,96	1,96	1,33
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,45	-0,18	-0,02	3,70	-0,49
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,45	2,01	1,46	4,35	2,35
d. Kesehatan dan Pendidikan	9,00	1,93	3,36	2,19	4,82
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,08	-3,78	1,50	2,85	6,61
f. Hotel dan Restoran	5,80	-2,18	3,19	4,74	8,24
g. Lainnya	5,64	0,07	0,06	0,78	4,00

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok non-makanan lebih fluktuatif dibandingkan dengan kelompok makanan. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 s.d. 2023), rata-rata pertumbuhan kelompok konsumsi non-makanan mencapai 3,71 persen, sedangkan kelompok makanan terus mengalami pertumbuhan, hingga sebesar 3,68 persen. Pertumbuhan “riil” menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan/penurunan kemakmuran masyarakat.

Tabel 10 **Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pohuwato (Persen), 2019-2023²**

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,15	2,04	3,04	3,40	3,87
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,63	2,03	2,82	2,17	3,27
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,37	1,92	1,94	4,13	2,89
d. Kesehatan dan Pendidikan	2,69	1,93	2,68	3,07	3,98
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,51	0,08	0,36	4,14	3,03
f. Hotel dan Restoran	1,86	2,08	2,83	4,93	4,13
g. Lainnya	1,35	1,04	1,06	1,43	3,79

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) yang terjadi selama periode 2019 s.d. 2023 berfluktuasi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 2,15 persen (2019); 2,04 persen (2020); 3,04 persen (2021); 3,40 persen (2022) dan 3,87 persen (2023). Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, harga kelompok lainnya meningkat lebih tinggi dibandingkan kelompok konsumsi lainnya.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

²Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	38,64	39,03	40,03	42,58	45,10
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	27,53	27,43	27,54	28,33	29,26
Proporsi terhadap PDRB					
(Persentase Atas Dasar Harga Berlaku)	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa secara nominal nilai pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2019 tercatat sebesar 38,64 miliar rupiah dan meningkat menjadi 45,10 miliar rupiah pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, secara riil pengeluaran konsumsi institusi ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dilihat dari peranannya terhadap PDRB, komponen ini hanya memberikan kontribusi di bawah 1 persen terhadap total PDRB yang tercipta di Kabupaten Pohuwato. LNPRT di Kabupaten Pohuwato umumnya didominasi oleh lembaga keagamaan, seperti: masjid, organisasi keagamaan, dan sebagainya namun tidak menampik peran dari organisasi politik yang berperan dalam pembentukan PDRB kategori konsumsi LNPRT.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Pohuwato serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Tabel 12 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	1.042,74	985,07	1.037,41	1.068,35	1.103,88
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	683,80	636,57	657,29	661,24	664,69
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	15,75	14,62	14,70	14,18	13,61
Konsumsi Pemerintah per Kapita/Tahun (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	6.631,52	6.746,59	7.024,24	7.155,85	7.269,52
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	4.348,77	4.359,77	4.450,47	4.428,99	4.377,31

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan³ (%)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	4,81	-6,91	3,25	0,60	0,52
b. Konsumsi per Kapita	5,02	0,25	2,08	-0,48	
Jumlah Penduduk (000 Orang)	157,24	146,01	147,69	149,30	151,85

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2019, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 1.042,74 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2023 nilainya mencapai 1.103,88 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 nilainya mencapai 664,69 miliar rupiah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan, dari 15,75 persen di tahun 2019 hingga mencapai 13,61 persen pada tahun 2023. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2023, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2019.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran pemerintah secara total menunjukkan peningkatan tiap tahun yang ditunjukkan oleh rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2019, konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 6.631,52 ribu rupiah, dan meningkat tiap tahunnya (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan (lihat Tabel 11). Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang positif selama tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 hingga 2022, pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita melambat dari 5,02 persen (2019), 0,25 persen (2020), kemudian tumbuh 2,08 persen (2021) dan melambat lagi mencapai -0,48 persen (2022).

³Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik) atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁴. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 13 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	1.298,73	1.309,73	1.359,49	1.449,27	1.543,66
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	959,87	954,14	966,49	986,37	1.015,09
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	19,61	19,44	19,27	19,24	19,03
Struktur PMTB⁵					
a. Bangunan (Miliar Rp)	670,83	675,48	710,30	774,23	838,85
(%)	51,65	51,57	52,25	53,42	54,34
b. Non-bangunan (Miliar Rp)	627,90	634,24	649,19	675,04	704,81
(%)	48,35	48,43	47,75	46,58	45,66
Total PMTB (Miliar Rp)	1.298,73	1.309,73	1.359,49	1.449,27	1.543,66
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan⁶ (%)					
a. Bangunan	0,85	-0,63	2,51	3,39	4,40
b. Non-bangunan	6,52	-0,56	0,07	0,68	1,33
Total PMTB	3,60	-0,60	1,29	2,06	2,91

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Selain fluktuasi yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah), PMTB juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif secara nominal maupun secara riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2020 melambat dari 3,60 persen (2019) menjadi -0,60 persen (2020), kemudian tumbuh mencapai 2,91 persen (2023). Pertumbuhan

⁴Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁵Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku

⁶Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010

PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sub komponen bangunan dan sub komponen non-bangunan juga cenderung fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif stabil selama periode 2019-2023, yakni pada kisaran 45-48 persen. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2019 sebesar 0,85 persen. Keadaan ini mengalami perlambatan pada tahun 2020 yang hanya -0,63 persen dan tumbuh 4,40 persen pada tahun 2023. Sama halnya dengan sub komponen bangunan, sub komponen non-bangunan juga mengalami penurunan pertumbuhan dari 6,52 persen (2019) menjadi -0,60 persen (2020). Pada tahun 2023, baik dari sub komponen bangunan maupun non-bangunan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,40 persen dan 1,13 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini dapat berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya dapat memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pohuwato, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	161,58	126,77	110,88	117,19	124,53
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	86,41	66,96	57,29	58,46	59,53
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	2,44	1,88	1,57	1,56	1,54

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen Perubahan Inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Selama periode 2019 s.d. 2021, nilai perubahan inventori baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023. Pada tahun 2019, nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 161,58 miliar rupiah, lalu mengalami penurunan menjadi 126,77 miliar tahun 2020. Kemudian terjadi penurunan kembali menjadi 110,88 miliar rupiah pada tahun 2021 dan kembali naik mencapai 124,53 miliar rupiah pada tahun 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan 2010. Sementara itu, dilihat dari proporsinya, kontribusi komponen ini terhadap total PDRB yang tercipta selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini berkisar antara 1-2 persen.

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah terdapat keterbatasan sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang

yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok, yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki dua (angka), positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Laju pertumbuhan pada komponen net ekspor pada publikasi ini ditulis “-” karena tidak memiliki makna dan tidak dapat dianalisis lebih dalam.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor-impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN

<https://www.databank.worldbank.org/data/country-query-views>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Data *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya maka disajikan data PDRB per kapita.

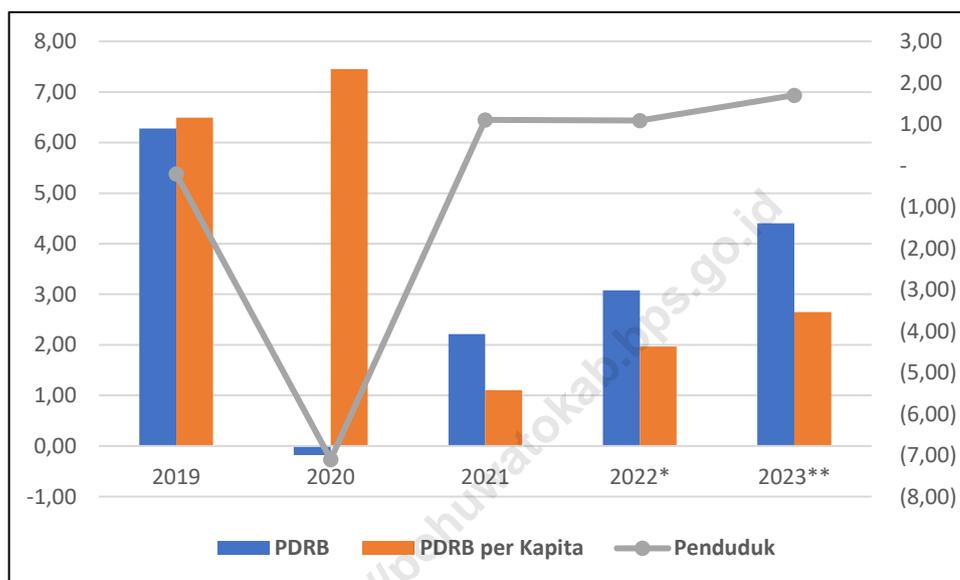
Tabel 15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	6.621,89	6.736,10	7.055,54	7.534,01	8.110,69
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	4.610,49	4.602,33	4.704,13	4.849,00	5.062,52
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	42.113,53	46.112,70	47.772,97	50.476,50	53.412,52
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	29.321,52	31.505,75	31.851,56	32.478,90	33.338,98
Pertumbuhan					
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)	6,49	7,45	1,10	1,97	2,65
Jumlah Penduduk (000 Orang)	157,24	146,08	147,69	149,30	151,85
Pertumbuhan (%)	-0,20	-7,10	1,10	1,09	1,70

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

PDRB per kapita Kabupaten Pohuwato menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 14). Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Pohuwato rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Pohuwato sebesar 53.412,52 ribu rupiah.

Sementara itu, pertumbuhan per kapita secara “riil” selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan yang positif. Namun, pertumbuhan PDRB dan penduduk mengalami fluktuasi. Tahun 2019, PDRB dan PDRB per kapita mengalami peningkatan pesat pada mencapai 6,49 persen (PDRB per kapita) dan 6,28 persen (PDRB atas dasar harga konstan 2010). Kemudian pada tahun 2020, jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 7,1 persen dan PDRB menurun sebesar 0,18 persen.



Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Gambar 2 Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (Persen), 2019-2023

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini, konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Pohuwato (sekitar 56 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Pohuwato sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun didalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 16 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, Kabupaten Pohuwato, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	3.766,63	3.839,11	3.997,41	4.239,55	4.525,53
Total Ekspor					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	2.848,02	2.847,14	3.238,81	3.566,68	3.960,89
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	1,32	1,35	1,23	1,19	1,14

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mencapai 1,32. Rasio ini terus mengalami penurunan pada tahun-tahun setelahnya menjadi sebesar 1,14 pada tahun 2023. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio yang terjadi setelah tahun 2020 lebih disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

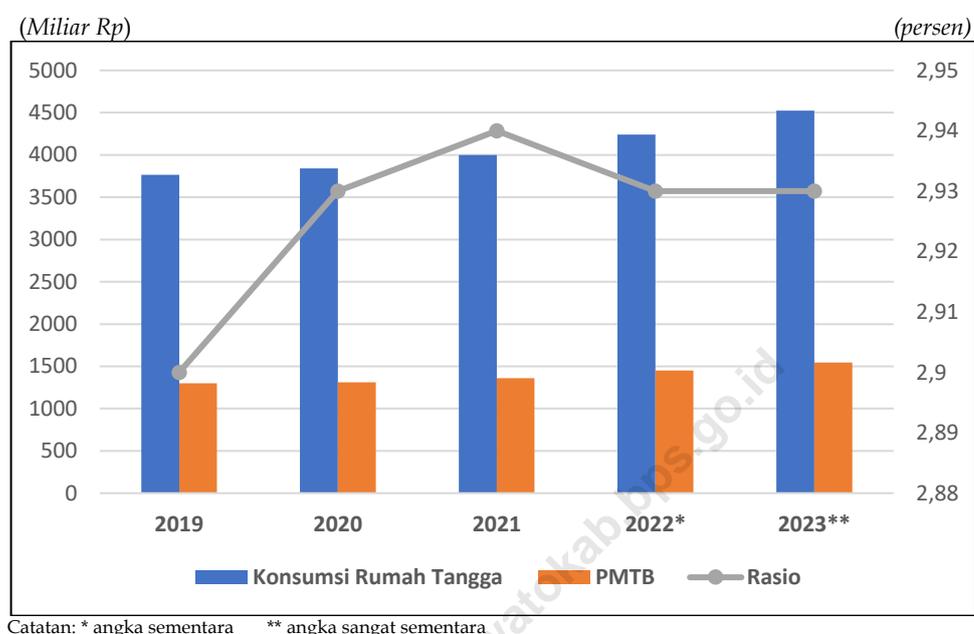
Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Pohuwato digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 17 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pohuwato, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	3.766,63	3.839,11	3.997,41	4.239,55	4.525,53
Total PMTB					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	1.298,73	1.309,73	1.359,49	1.449,27	1.543,66
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,90	2,93	2,94	2,93	2,93

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 2,90 persen menjadi 2,93 pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena pertumbuhan investasi fisik yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.



Gambar 3 Perkembangan Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

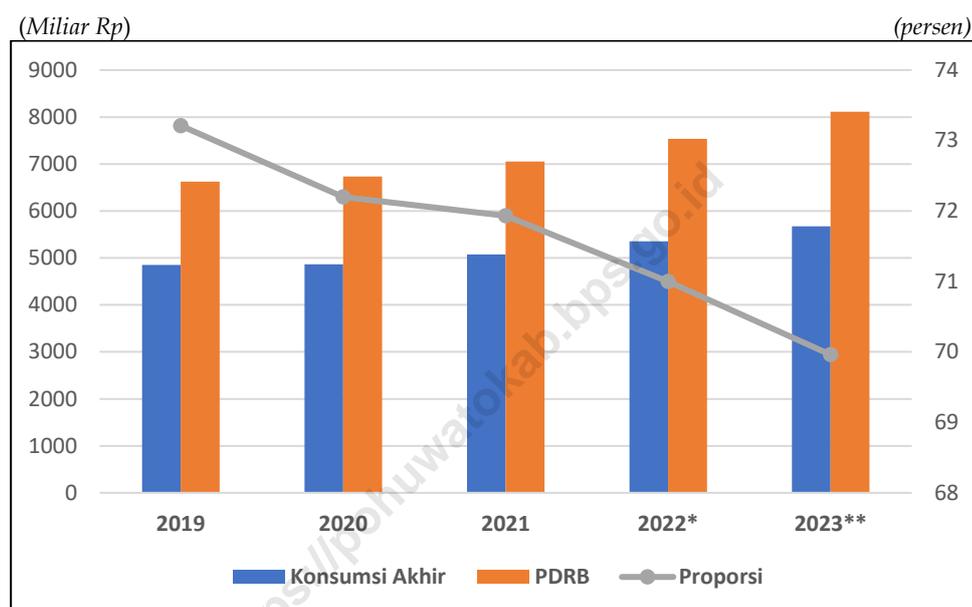
4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi: rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 18 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	3.766,63	3.839,11	3.997,41	4.239,55	4.525,53
b. LNPRT	38,64	39,03	40,03	42,58	45,10
c. Pemerintah	1.042,74	985,07	1.037,41	1.068,35	1.103,88
Jumlah	4.848,01	4.863,20	5.074,85	5.350,48	5.674,50
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	6.621,89	6.736,10	7.055,54	7.534,01	8.110,69
Proporsi (%)	73,21	72,20	71,93	71,00	69,96

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Pohuwato digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (sekitar 70 persen). Konsumsi akhir cenderung meningkat setiap tahun, namun proporsi terhadap PDRB mengalami penurunan hingga 69,96 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, peran produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB dan ekspor) meningkat selama 5 tahun terakhir.



Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Gambar 4 Perkembangan Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato, 2019-2023

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar kabupaten/kota. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor dapat pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 19 Rasio Ekspor terhadap PMTB Kabupaten Pohuwato, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor					

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	2.848,02	2.847,14	3.238,81	3.566,68	3.960,89
Total PMTB					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	1.298,73	1.309,73	1.359,49	1.449,27	1.543,66
Rasio Ekspor terhadap PMTB	2,19	2,17	2,38	2,46	2,57

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 s.d. 2023), ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB bernilai positif yang menunjukkan bahwa selama tahun 2019 hingga 2023 lebih banyak barang diekspor dari Kabupaten Pohuwato. Rasio ekspor terhadap PMTB tidak selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2020, rasio ekspor terhadap PDRB menjadi 2,17 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut kenaikan ekspor lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Kemudian rasio ekspor terhadap PMTB meningkat kembali menjadi 2,57 pada tahun 2023.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain (termasuk kabupaten/kota lain). Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 20 Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	6.621,89	6.736,10	7.055,54	7.534,01	8.110,69
Total Impor					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	2.534,45	2.410,74	2.728,49	2.949,60	3.192,89
Rasio PDRB terhadap Impor	2,61	2,79	2,59	2,55	2,54

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Rasio PDRB terhadap impor selama periode 2019 s.d. 2020 menunjukkan peningkatan dari 2,61 (2019) menjadi 2,79 (2020). Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya

ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Namun, tahun 2021 sampai 2023 rasio PDRB terhadap impor mengalami penurunan menjadi 2,54 yang menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 21 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	6.621,89	6.736,10	7.055,54	7.534,01	8.110,69
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	72,32	73,65	72,11	71,86	71,75
Total Impor Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	2.534,45	2.410,74	2.728,49	2.949,60	3.192,89
Total Impor Atas Dasar Harga Berlaku (%)	27,68	26,35	27,89	28,14	28,25
Total Permintaan Akhir (Miliar Rp)	9.156,34	9.146,84	9.784,03	10.483,62	11.303,58
Total Permintaan Akhir (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan, baik dari luar negeri maupun luar kabupaten, dengan rentang 26 s.d. 28 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru dapat dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 9.156,34 miliar rupiah (2019) menjadi sebesar 11.303,58 miliar rupiah (2023).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 6.621,89 miliar rupiah (2019); 6.736,63 miliar rupiah (2020); 7.055,30 miliar rupiah (2021) 7.535,99 miliar rupiah (2022) dan 8.110,69 miliar rupiah (2023). Oleh karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor dengan nilai masing-masing tahun sebesar 2.534,45 miliar rupiah (2019); 2.410,74 miliar rupiah (2020); 2.728,49 miliar rupiah (2021); 2.949,60 miliar rupiah (2022) dan 3.192,89 miliar rupiah (2023).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri dan luar kabupaten/kota (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "**Ekspor Neto**", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka akan terjadi devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah diantaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 21 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	2.848,02	2.847,14	3.238,59	3.566,68	3.960,89
Nilai Impor					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	2.534,45	2.410,74	2.728,49	2.947,63	3.192,89
Net Ekspor (X-M)					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	313,57	436,40	510,33	617,08	768,00
Rasio Ekspor terhadap Impor					
Impor	1,12	1,18	1,19	1,21	1,24

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Selama periode 2019-2023, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato dengan luar negeri dan antar kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, ekspor lebih tinggi 313,57 miliar dari impor. Begitu pula yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato mengalami surplus selama tahun 2019-2023. Surplus perdagangan Kabupaten Pohuwato yang terjadi antara tahun 2019 s.d. 2023 tercatat masing-masing sebesar 313,57 miliar rupiah (2019); 436,93 miliar rupiah (2020); 510,10 miliar rupiah (2021); 619,05 miliar rupiah (2022) dan 768,00 miliar rupiah (2023).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 rasionya sebesar 1,12 dan meningkat menjadi 1,24 pada tahun 2023. Tabel 21 menunjukkan bahwa rasio ekspor terhadap impor selalu diatas 1. Ketika rasio diatas 1, maka nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor, dan sebaliknya.

5

PENUTUP

<https://pohuwatokab.bps.go.id>

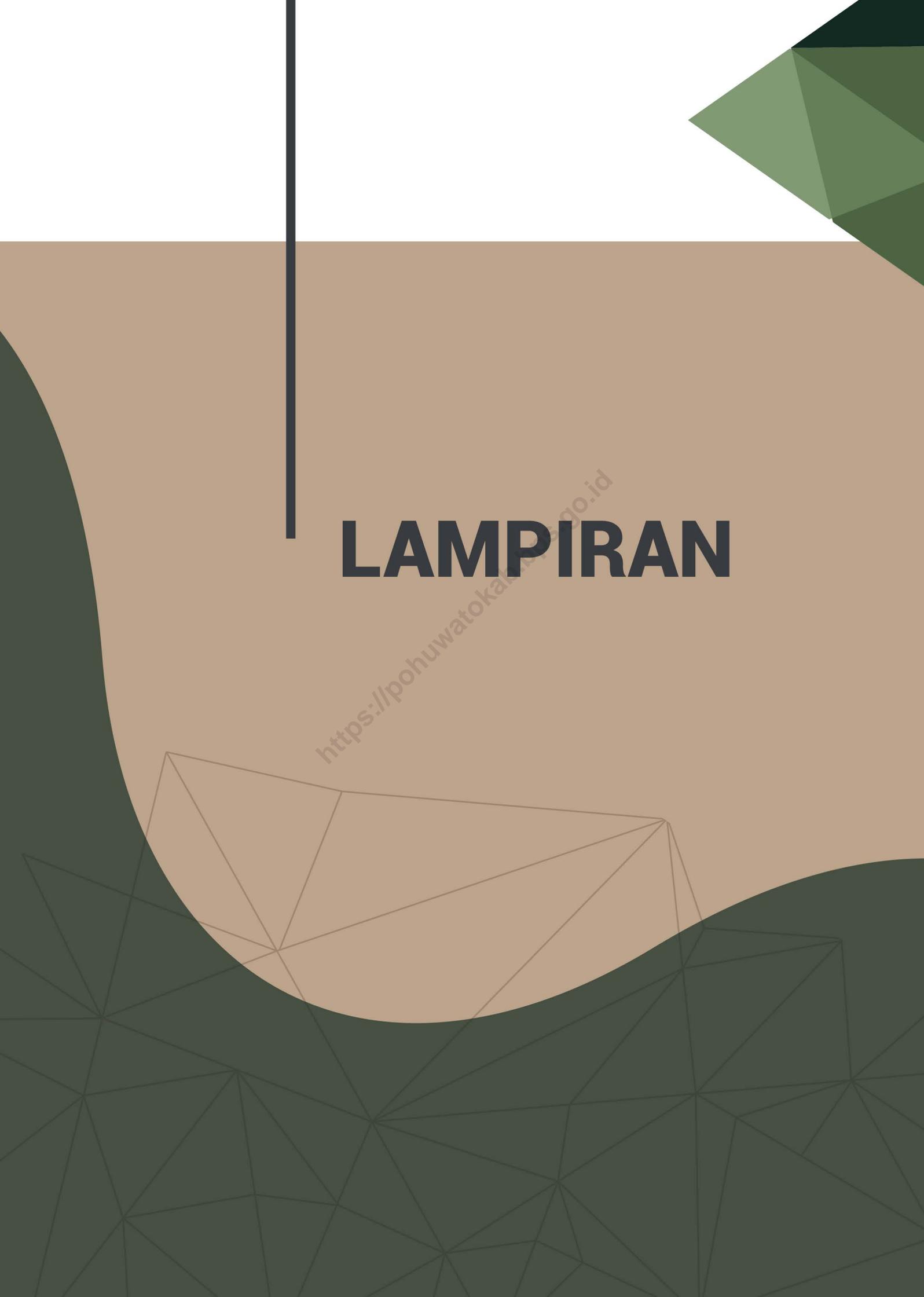
1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 s.d. 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pohuwato pada periode tersebut. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti: penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2019 s.d. 2023, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam bentuk satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, orang, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain, seperti: pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan, secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti: PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti: ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Pohuwato terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*) maupun daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input-Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas, dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah Tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How to Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC 1979.
14. Keuning, J. Steven, *An Estimate of The Fixed Capital Stock by Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No. 4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2 Rev. 3, New York 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev. 1, New York 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York 2000.

20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC 1993.

<https://pohuwatokab.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://pohuwatokat.com.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.766.626,57	3.839.107,25	3.997.407,69	4.239.552,59	4.525.525,52
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.823.731,10	1.894.323,58	1.990.248,00	2.098.285,78	2.208.489,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	183.090,98	186.475,93	191.697,84	203.113,55	208.732,74
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	340.641,23	354.139,19	366.387,05	398.131,62	419.252,03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	304.645,46	316.519,58	335.928,41	353.831,13	385.645,01
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	779.802,33	750.880,77	764.827,56	819.260,21	899.913,40
1.f. Hotel dan Restoran	133.723,93	133.533,03	141.697,95	155.734,10	175.524,84
1.g. Lainnya	200.991,52	203.235,17	206.608,89	211.196,19	227.967,90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38.638,69	39.026,36	40.030,98	42.582,76	45.101,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.042.742,88	985.070,58	1.037.407,21	1.068.346,61	1.103.877,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1.298.731,30	1.309.725,13	1.359.490,49	1.449.267,88	1.543.657,00
4.a. Bangunan	670.826,97	675.483,39	710.298,76	774.228,29	838.845,63
4.b. Non-Bangunan	627.904,33	634.241,73	649.191,73	675.039,59	704.811,37
5. Perubahan Inventori	161.583,96	126.769,88	110.879,20	117.185,53	124.531,84
6. Net Ekspor	313.565,65	436.929,43	510.326,08	617.079,49	767.998,42
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.621.889,05	6.736.096,55	7.055.541,65	7.534.014,85	8.110.691,31

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2.707.191,62	2.712.823,81	2.761.435,67	2.831.257,11	2.921.641,51
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.218.194,23	1.240.006,87	1.264.304,22	1.289.138,07	1.306.330,61
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	138.267,30	138.023,10	137.996,79	143.108,37	142.408,41
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	258.682,31	263.871,09	267.796,94	279.450,53	286.022,27
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	218.705,62	222.930,82	230.421,94	235.461,89	246.803,14
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	615.509,73	592.220,83	601.086,87	618.247,61	659.112,28
1.f. Hotel dan Restoran	99.872,33	97.696,80	100.812,57	105.588,82	114.287,34
1.g. Lainnya	157.960,10	158.074,29	159.018,35	160.261,82	166.677,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	27.530,55	27.428,66	27.540,35	28.327,57	29.260,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	683.801,27	636.571,41	657.285,44	661.235,09	664.694,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	959.867,12	954.143,30	966.490,14	986.372,56	1.015.092,61
4.a. Bangunan	481.902,21	478.878,04	490.909,27	507.542,69	529.887,24
4.b. Non-Bangunan	477.964,90	475.265,26	475.580,87	478.829,87	485.205,37
5. Perubahan Inventori	86.411,01	66.962,82	57.290,11	58.456,69	59.529,41
6. Net Ekspor	145.684,70	204.398,83	234.081,86	283.355,48	372.305,18
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.610.486,26	4.602.328,82	4.704.125,58	4.849.004,49	5.062.523,77

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	56,88	56,99	56,66	56,27	55,80
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,54	28,12	28,21	27,85	27,23
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,76	2,77	2,72	2,70	2,57
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,14	5,26	5,19	5,28	5,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,60	4,70	4,76	4,70	4,75
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,78	11,15	10,84	10,87	11,10
1.f. Hotel dan Restoran	2,02	1,98	2,01	2,07	2,16
1.g. Lainnya	3,04	3,02	2,93	2,80	2,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,75	14,62	14,70	14,18	13,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	19,61	19,44	19,27	19,24	19,03
4.a. Bangunan	10,13	10,03	10,07	10,28	10,34
4.b. Non-Bangunan	9,48	9,41	9,20	8,96	8,69
5. Perubahan Inventori	2,44	1,88	1,57	1,56	1,54
6. Net Ekspor	4,74	6,48	7,23	8,19	9,47
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	8,73	1,92	4,12	6,06	6,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,66	3,87	5,06	5,43	5,25
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	9,20	1,85	2,80	5,95	2,77
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,93	3,96	3,46	8,66	5,30
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	11,93	3,90	6,13	5,33	8,99
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,68	-3,71	1,86	7,12	9,84
1.f. Hotel dan Restoran	7,77	-0,14	6,11	9,91	12,71
1.g. Lainnya	7,06	1,12	1,66	2,22	7,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	12,56	1,00	2,57	6,37	5,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,51	-5,53	5,31	2,98	3,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,64	0,85	3,80	6,60	6,51
4.a. Bangunan	2,89	0,69	5,15	9,00	8,35
4.b. Non-Bangunan	8,75	1,01	2,36	3,98	4,41
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	8,85	1,72	4,73	6,78	7,65

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,70	0,21	1,79	2,53	3,19
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,38	1,79	1,96	1,96	1,33
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,45	-0,18	-0,02	3,70	-0,49
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,45	2,01	1,46	4,35	2,35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9,00	1,93	3,36	2,19	4,82
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,08	-3,78	1,50	2,85	6,61
1.f. Hotel dan Restoran	5,80	-2,18	3,19	4,74	8,24
1.g. Lainnya	5,64	0,07	0,60	0,78	4,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,48	-0,37	0,41	2,86	3,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,81	-6,91	3,25	0,60	0,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3,60	-0,60	1,29	2,06	2,91
4.a. Bangunan	0,85	-0,63	2,51	3,39	4,40
4.b. Non-Bangunan	6,52	-0,56	0,07	0,68	1,33
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	6,28	-0,18	2,21	3,08	4,40

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 6 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	139,13	141,52	144,76	149,74	154,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	149,71	152,77	157,42	162,77	169,06
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	132,42	135,10	138,92	141,93	146,57
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	131,68	134,21	136,86	142,47	146,58
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	139,29	141,98	145,79	150,27	156,26
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	126,69	126,79	127,24	132,51	136,53
1.f. Hotel dan Restoran	133,89	136,68	140,56	147,49	153,58
1.g. Lainnya	127,24	128,57	129,93	131,78	136,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	140,35	142,28	145,35	150,32	154,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	152,49	154,75	157,83	161,57	166,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	135,30	137,27	140,66	146,93	152,07
4.a. Bangunan	139,20	141,06	144,69	152,54	158,31
4.b. Non-Bangunan	131,37	133,45	136,51	140,98	145,26
5. Perubahan Inventori	186,99	189,31	193,53	200,47	209,19
6. Net Ekspor	215,24	213,50	218,01	218,47	206,28
PDRB	143,63	146,36	149,99	155,41	160,21

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Pohuwato Menurut Pengeluaran (Persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	1,91	1,71	2,29	3,44	3,44
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,15	2,04	3,04	3,40	3,87
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,63	2,03	2,82	2,17	3,27
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,37	1,92	1,97	4,13	2,89
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,69	1,93	2,68	3,07	3,98
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,51	0,08	0,35	4,14	3,03
1.f. Hotel dan Restoran	1,86	2,08	2,83	4,93	4,13
1.g. Lainnya	1,35	1,04	1,06	1,43	3,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,88	1,38	2,16	3,42	2,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,66	1,48	1,99	2,37	2,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,97	1,45	2,47	4,45	3,50
4.a. Bangunan	2,02	1,33	2,58	5,43	3,78
4.b. Non-Bangunan	2,09	1,58	2,29	3,28	3,04
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	2,42	1,90	2,48	3,62	3,11

Catatan: * angka sementara ** angka sangat sementara

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN POHUWATO**

Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa
Homepage: pohuwatokab.bps.go.id
E-mail: bps7503@bps.go.id

ISSN 2987-3096

